

SONGKOK RECCA DI KERAJAAN BONE: SIMBOL DAN FUNGSINYA

Ilham Firman^a, Awalia Rahma^b, Zakiya Darajat^c, Jajang Jahroni^d, Nurul Azizah^e

ilham.firman22@mhs.uinjkt.ac.id, awalia.rahma@uinjkt.ac.id, zakiya.darajat@uinjkt.ac.id,
jajang.jahroni@uinjkt.ac.id, nurul@uinjkt.ac.id

^{a b c d e} UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

ARTICLE INFO

Received: 1st July 2026

Revised: 7th August 2026

Accepted: 12th August 2026

Published: 13th August 2026

Permalink/DOI

<https://doi.org/10.51190/jazirah.v7i1.406>



This work is licensed under
CC BY-SA 4.0.

Print ISSN: 2716-4454,
Online ISSN: 2774-3144

ABSTRAK

Songkok Recca, penutup kepala anyaman serat lontar (*Borassus flabellifer*) yang dikenakan laki-laki Bugis, dikenal luas sebagai warisan budaya Bugis-Makassar dan dipakai di berbagai wilayah Sulawesi Selatan, namun fungsi historisnya sebagai penanda hierarki sosial pada masa kerajaan, khususnya di Kerajaan Bone, relatif belum banyak ditelusuri secara khusus melalui pendekatan sejarah. Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek etnobotani bahan bakunya atau fungsi kontemporer sebagai identitas budaya dan sumber penghidupan pasca-1950, sementara fungsi politik dan simboliknya pada masa kerajaan, terutama interaksinya dengan kebijakan kolonial Belanda, belum mendapat perhatian khusus. Artikel ini secara spesifik membatasi lokusnya pada Kerajaan Bone dan menelusuri fungsi Songkok Recca sejak aturan pemakaiannya dibakukan secara rinci pada masa pemerintahan Raja Bone ke-32, La Mappanyukki, hingga pembubaran kerajaan pada 1950, dengan memadukan empat tahapan metode sejarah (heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi) bersama kerangka antropologi interpretatif Clifford Geertz, khususnya *thick description*, untuk membaca arsip kolonial dan foto koleksi KITLV Leiden (sekitar 1910–1938) bukan sekadar sebagai data faktual, melainkan sebagai teks yang menyimpan lapisan makna sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Songkok Recca berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang diatur secara rinci berdasarkan proporsi lilitan benang emas untuk setiap strata bangsawan, bahwa maknanya sudah plural sejak sebelum era modern melalui koeksistensi dengan varian Songko Guru bagi golongan religius-intelektual, dan bahwa pemerintah kolonial Belanda pasca-1905 turut mendokumentasikan serta memanfaatkan simbol ini untuk melegitimasi sistem *zelfbestuur* sejak 1931. Kontribusi penelitian ini adalah menghadirkan pembacaan historis-antropologis yang mengintegrasikan arsip kolonial dengan tradisi lisan Bugis-Bone, sekaligus menegaskan bahwa Songkok Recca, sebelum menjadi produk budaya-komersial seperti dikenal saat ini, pernah berfungsi sebagai penanda hierarki yang diatur nyaris birokratis oleh istana.

KATA KUNCI

Songkok Recca; Kerajaan Bone; Hierarki Kebangsawanan; Kontrol Sosial; Kolonialisme Belanda.

ABSTRACT

*The gold-thread width on a Songkok Recca, a woven lontar-fiber cap worn by Bugis men, once told you exactly where a man stood in the social order of the Bone Kingdom: an anak pattola's cap carried a full band, a raja matase's carried half, a commoner's a thinner strip still, and an ata wore none at all. Existing scholarship on the cap has mostly examined its raw-material ethnobotany or its present-day role as cultural identity and livelihood in Desa Paccang, leaving its pre-1950 political-symbolic function, and its entanglement with Dutch colonial policy, comparatively unexamined. This study narrows its locus to the Bone Kingdom and traces the cap's function from the point its wear was formally codified under the 32nd king, La Mappanyukki, through the kingdom's dissolution in 1950, combining the four stages of historical method (heuristics, source criticism, interpretation, historiography) with Clifford Geertz's interpretive anthropology, reading colonial archives and KITLV Leiden photographs (circa 1910–1938) as texts carrying layered social meaning rather than as plain fact. The findings show the cap functioning as an almost bureaucratic instrument of social control keyed to precise gold-thread proportions; a meaning that was already plural before the modern era, coexisting with the Songko Guru variant worn by religious-intellectual figures; and Dutch officials after 1905 documenting and using the symbol to legitimize indirect rule (*zelfbestuur*) from 1931 onward. The contribution here is a historical-anthropological reading that joins colonial records with Bugis-Bone oral tradition, and a reminder that before Songkok Recca became the commercial-cultural product it is today, it once functioned as a hierarchy marker regulated with near-bureaucratic precision by the palace.*

KEYWORDS

Songkok Recca, Bone Kingdom, Social Hierarchy, Social Control, Dutch Colonial Policy.

PENDAHULUAN

Songkok Recca adalah penutup kepala anyaman yang menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Bugis di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dan di beberapa daerah juga disebut *Songko Ure Cak* atau *Songko To Bone*¹. Songkok ini dianyam dari serat pelepah daun lontar (*Borassus flabellifer*) yang diambil melalui proses pemukulan berulang yang disebut *direcca-recca*, sebuah istilah yang oleh sebagian budayawan diyakini menjadi asal penamaan songkok itu sendiri². Pohon lontar yang menjadi bahan baku utamanya tumbuh subur di Kabupaten Bone, dengan sentra penganyaman yang paling dikenal terletak di Desa Pacing, Kecamatan Awangpone.

Sejak masa kerajaan, songkok ini tidak hadir dalam satu bentuk tunggal. Varian yang dililit benang emas, disebut *Songko Pamiring* atau *Pamiring Pulaweng*, secara eksklusif hanya dikenakan kalangan bangsawan, sementara varian polos tanpa hiasan, disebut *Songko Kabusu*³, dipakai lebih luas³. Di luar dua varian yang berkaitan dengan kelas sosial itu, dikenal pula *Songko Guru*, varian yang dikenakan para guru mengaji dan pejabat urusan keagamaan seperti Kadhi, Imam, Khatib, dan Bilal. Bentuknya sedikit berbeda dari Songko Pamiring dan tidak berhias emas sama sekali, karena rujukannya bukan kedudukan bangsawan melainkan kedudukan sebagai *anregurutta* atau ulama⁴. Perbedaan ini penting ditegaskan sejak awal, sebab artikel ini akan menunjukkan bahwa Songkok Recca, bahkan sebelum kerajaan ini berakhir, sudah membawa dua fungsi penanda yang berjalan berdampingan: penanda strata bangsawan, dan penanda golongan religius-intelektual.

Gambar 1. Penutup kepala pria bergaya Bugis, yang dikenal sebagai Songkok Recca di Pasar Malam Chester Street, Tawau. (30 April 2023).



(Sumber: The Bangsawan, Songkok Recca, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

¹ Hasnani Siri, Muhammad Farid, Muhammad Jufri, Muhiddin Bakri, dan Nurleli Ramli, "Preserving Songkok Reccak in Modern Era: Identity of Bugis People in Bone Regency," *Russian Law Journal* XI, no. 3 (2023): 890.

² Muh. Farid Ariandi dan Muhammad Jufri, "Eksistensi Songkok Recca dalam Peradaban Masyarakat Bone," *CARITA: Jurnal Sejarah dan Budaya* (2022): 47.

³ Siri dkk., "Preserving Songkok Reccak in Modern Era," 893.

⁴ Ariandi dan Jufri, "Eksistensi Songkok Recca," 57-58.

Gambar 1 menunjukkan visual Songkok Recca yang berbentuk topi pendek dengan anyaman serat lontar yang rapat, dan pada varian Pamiring dilengkapi lilitan benang emas di bagian pinggirnya. Perlu dicatat bahwa jejak Songkok Recca tidak berhenti pada masa kerajaan. Pasca-1950, songkok ini meluas pemakaiannya lintas kelas sosial, menjadi sumber mata pencaharian di Desa Pacing, dan pada tahun 2018 memperoleh pengakuan resmi sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan⁵. Songkok ini juga belakangan bernegosiasi dengan simbol-simbol keislaman, baik di tanah Bone sendiri maupun di kalangan masyarakat Bugis perantauan⁶. Perkembangan-perkembangan pasca-1950 ini sengaja hanya disinggung sebagai latar belakang dan celah penelitian (*research gap*), karena artikel ini secara sadar membatasi fokus historisnya pada periode sebelum dan saat keruntuhan sistem Kerajaan Bone, agar kajian tetap berpijak pada disiplin sejarah dan tidak melebar menjadi kajian antropologi atau sosiologi kontemporer.

Songkok Recca dan variannya sebenarnya tidak eksklusif milik Bone. Pemakaiannya tersebar di kawasan Bugis-Makassar dan Sulawesi Selatan secara umum, sebagaimana tercatat dalam sejumlah kajian budaya materi Bugis⁷. Artikel ini, meski menyadari sebaran yang lebih luas itu, secara sadar membatasi lokusnya hanya pada Kerajaan Bone, dengan pertimbangan bahwa di wilayah inilah aturan hierarki pemakaiannya terdokumentasi paling rinci, terutama pada masa pemerintahan Raja Bone ke-32, La Mappanyukki, ketika ketebalan lilitan emas diatur berjenjang menurut derajat kebangsawanan pemakainya⁸: *anak pattola* atau putra mahkota mengenakan lilitan emas penuh; *Arung Mattola Menre* dan kerabat dekat raja mengenakan lilitan sekitar tiga perlima tinggi songkok; golongan *raja matase* mengenakan lilitan setengah tinggi songkok; golongan *tau deceng*, *tau maradeka*, dan *tau sama* mengenakan lilitan tipis, sekitar seperempat; sementara golongan *Ata* sebagai strata terbawah sama sekali tidak diperbolehkan mengenakan songkok berhias emas. Kerincian ini akan diuraikan lebih jauh, lengkap dengan ilustrasinya, pada bagian Hasil dan Pembahasan.

Kajian akademik mengenai Songkok Recca sejauh ini masih menyisakan celah yang menjadi alasan penelitian ini disusun. Literatur etnografis Jawiah A.

⁵ Nurlaeliana, Satriani, Tauhidah Bachtiar, Anita H, Mutmainna Ekawati, Fandi Wahyudi, dan Hasmatang, "Kajian Etnobotani *Borassus flabellifer* Bahan Baku Songkok Recca Ciri Khas Masyarakat Bugis Bone," *Biogenerasi: Jurnal Pendidikan Biologi* 10, no. 2 (2025): 1735.

⁶ Ismail Suardi Wekke, Rosdalina Bukido, dan Nam Rumkel, *Islam dan Adat, Keteguhan Adat dalam Kepatuhan Beragama* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

⁷ Christian Pelras, *The Bugis* (Oxford: Blackwell Publishers, 1996), dikutip dalam Siri dkk., "Preserving Songkok Reccak in Modern Era," 893.

⁸ Ariandi dan Jufri, "Eksistensi Songkok Recca," 57-58.

Baso dan Salahuddin Hasan memberikan dokumentasi paling rinci mengenai teknik pembuatan dan fungsi sosial songkok pada paro kedua abad ke-20⁹, sementara penelitian lapangan yang lebih baru dari Hasnani Siri dan kawan-kawan, serta Muh. Farid Ariandi dan Muhammad Jufri, lebih banyak merekam tradisi lisan mengenai periode kerajaan melalui wawancara dengan budayawan Bone¹⁰. Adapun dimensi keberagaman pasca-1950 dicatat oleh Wekke, Bukido, dan Rumkel¹¹, sedangkan aspek etnobotani bahan bakunya, sekaligus pengakuan Songkok Recca sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia pada 2018, dicatat oleh Nurlaeliana dan kawan-kawan¹². Ketiga kelompok kajian ini memang menyinggung masa kerajaan, tetapi secara umum lebih berorientasi pada fungsi kontemporer songkok sebagai identitas budaya, sumber penghidupan, dan bahan anyaman, ketimbang pada fungsi politik-simboliknya sendiri sebagai instrumen hierarki pada masa kerajaan, apalagi pada bagaimana fungsi itu berinteraksi dengan kebijakan kolonial Belanda. Di titik itulah celah penelitian ini berada: belum ada kajian yang secara khusus menghubungkan arsip kolonial, catatan etnografis, dan tradisi lisan ke dalam satu pembacaan historis yang berkesinambungan tentang fungsi Songkok Recca sebelum 1950.

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan pada dua hal. Pertama, penggunaan kerangka antropologi interpretif Clifford Geertz¹³ sebagai alat baca yang memperlakukan foto kolonial, catatan etnografis, dan tradisi lisan sekaligus, bukan sebagai kumpulan fakta yang berdiri sendiri, melainkan sebagai teks yang menyimpan lapisan makna yang saling berkelindan. Kedua, penelitian ini secara eksplisit mempersempit periodisasinya: alih-alih menelusuri sejarah panjang Kerajaan Bone sejak awal berdirinya, pembahasan difokuskan sejak titik ketika aturan pemakaian Songkok Recca dibakukan secara rinci pada masa La Mappanyukki, yang bertepatan dengan periode kolonial, hingga pembubaran Kerajaan Bone pada 1950. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana fungsi Songkok Recca direpresentasikan pada masa pembakuan aturannya di bawah La Mappanyukki, bagaimana pemerintah kolonial Belanda memperlakukan simbol ini, dan bagaimana fungsi itu berubah menjelang berakhirnya Kerajaan Bone.

⁹ Jawiah A. Baso dan Salahuddin Hasan, *Songko Ure Cak (Topi Tradisional Bugis Makassar)* (Ujung Pandang: Proyek Pengembangan Permuseuman Sulawesi Selatan, 1983-1984).

¹⁰ Ariandi dan Jufri, "Eksistensi Songkok Recca," 45.

¹¹ Ismail Suardi Wekke, Rosdalina Bukido, dan Nam Rumkel, *Islam dan Adat, Keteguhan Adat dalam Kepatuhan Beragama* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

¹² Nurlaeliana, Satriani, Tauhidah Bachtiar, Anita H, Mutmainna Ekawati, Fandi Wahyudi, dan Hasmatang, "Kajian Etnobotani *Borassus flabellifer* Bahan Baku Songkok Recca Ciri Khas Masyarakat Bugis Bone," *Biogenerasi: Jurnal Pendidikan Biologi* 10, no. 2 (2025): 1734-1740.

¹³ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973).

Perkembangan Songkok Recca pasca-1950, termasuk pergeserannya menjadi produk budaya-komersial di Desa Pacing dan pengakuannya sebagai Warisan Budaya Tak Benda pada 2018, sengaja hanya disinggung sebagai penutup pembahasan, bukan sebagai objek analisis utama, agar kajian ini tetap berpijak pada disiplin sejarah dan tidak melebar menjadi kajian antropologi atau sosiologi budaya kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi¹⁴, yang pada setiap tahapannya dipadukan dengan kerangka antropologi interpretif Clifford Geertz agar sumber tidak hanya diperlakukan sebagai data faktual, melainkan sebagai teks yang menyimpan logika makna yang perlu ditafsirkan secara kontekstual.

Pada tahap heuristik, yakni penemuan dan pengumpulan bukti sejarah berupa catatan, kesaksian, dan fakta¹⁵, penulis menghimpun sumber dari dua kelompok utama: arsip dan koleksi foto kolonial KITLV Leiden sekitar 1910-1938 beserta catatan jurnalistik kolonial sezaman, dan naskah etnografis *Songko Ure Cak* terbitan Proyek Pengembangan Permuseuman Sulawesi Selatan 1983-1984. Penelitian akademik yang terbit pada dekade 2020-an digunakan secara selektif, hanya pada bagian yang merekam tradisi lisan budayawan Bone tentang periode kerajaan, bukan untuk mengkaji praktik kontemporer, sejalan dengan batas periodisasi yang telah dijelaskan pada bagian Pendahuluan.

Pada tahap kritik sumber, yaitu verifikasi kredibilitas dan keabsahan sumber¹⁶, penulis membedakan secara tegas antara sumber yang lahir langsung dari periode yang dikaji, seperti foto KITLV dan catatan kolonial, dengan sumber retrospektif yang mencatat tradisi lisan mengenai peristiwa jauh sebelumnya, misalnya berbagai versi cerita asal-usul songkok yang dihimpun melalui wawancara dengan budayawan Bone¹⁷. Tradisi lisan semacam ini diperlakukan sebagai data mengenai bagaimana masyarakat Bone mengingat dan memaknai masa lalunya, bukan sebagai catatan faktual yang tunggal dan pasti. Untuk sumber populer-jurnalistik mengenai garis waktu politik Kerajaan Bone, penulis memprioritaskan sumber yang secara eksplisit merujuk balik pada teks lontara atau kepustakaan akademik. Perlu diakui secara jujur bahwa pada beberapa argumen, khususnya mengenai motif kebijakan kolonial, penulis belum berhasil mengakses sumber primer administratif secara utuh, seperti

¹⁴ Faizal Arifin, *Metode Sejarah: Merencanakan dan Menulis Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Deepublish, 2023).

¹⁵ Madjid & Wahyudi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 219.

¹⁶ Madjid & Wahyudi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, 223.

¹⁷ Ariandi dan Jufri, "Eksistensi Songkok Recca," 50-52.

Memori van Overgave, sehingga sebagian pembacaan pada bagian Hasil dan Pembahasan bersifat inferensial dan akan ditandai secara eksplisit sebagai demikian, bukan disamarkan seolah-olah sudah final.

Pada tahap interpretasi, fakta-fakta yang telah disusun melalui kritik sumber dibaca melalui *thick description* Geertz¹⁸, yakni pembacaan yang tidak berhenti pada deskripsi permukaan suatu fakta, melainkan menelusuri lapisan makna sosial yang melingkupinya. Dalam praktiknya, *thick description* diterapkan dengan tiga cara pada penelitian ini. Pertama, terhadap keragaman narasi asal-usul songkok, ketidaktunggalan versi dibaca bukan sebagai kelemahan sumber yang perlu diseragamkan, melainkan sebagai data mengenai bagaimana Songkok Recca hidup dalam ingatan kolektif, bukan dalam catatan istana yang tunggal. Kedua, terhadap detail proporsi lilitan emas pada setiap strata, kerincian teknis tersebut dibaca sebagai bukti kesepakatan kolektif yang kuat mengenai makna setiap detail visual, bukan sekadar aturan berpakaian biasa. Ketiga, terhadap foto-foto kolonial KITLV, pendekatan ini digunakan untuk membaca konteks pemotretan, siapa yang difoto, dalam posisi apa, dan untuk kepentingan apa foto itu didokumentasikan lembaga kolonial, alih-alih memperlakukan foto semata sebagai ilustrasi pelengkap teks. Tahap terakhir, historiografi, merupakan tahap penulisan sejarah setelah pengumpulan sumber, kritik sumber, dan interpretasi dilakukan¹⁹, yang hasilnya disajikan pada bagian berikut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal-usul yang Tidak Tunggal tentang Songkok Recca

Tidak satu pun sumber yang dikaji dalam penelitian ini berhasil memastikan secara definitif kapan, di mana, dan oleh siapa Songkok Recca pertama kali dibuat, dan ketidaktunggalan inilah yang menjadi temuan pertama yang penting. Versi yang paling populer mengaitkan kemunculan songkok dengan ekspedisi militer Raja Bone ke-15, La Tenritatta Arung Palakka, ke Tana Toraja pada 1683. Karena pasukan Bone dan Toraja sama-sama mengenakan sarung dengan cara berbeda sehingga sulit dibedakan dalam pertempuran malam hari, Arung Palakka disebut memerintahkan pasukannya memasang Songkok Recca di kepala sebagai tanda pengenalan²⁰.

Versi kedua, dari budayawan Bone Andi Muhammad Yushand, justru menyangsikan kaitan nama songkok dengan peristiwa perang tersebut dan menelusurkan asal-usulnya pada golongan *to acca*, yakni kaum cendekiawan²¹.

¹⁸ Geertz, *The Interpretation of Cultures*.

¹⁹ Madjid & Wahyudi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, 230.

²⁰ Ariandi dan Jufri, "Eksistensi Songkok Recca," 50.

²¹ Andi Muhammad Yushand Tenritappu, Budayawan Bone, wawancara pada 13 Januari 2021, dikutip dalam Ariandi dan Jufri, "Eksistensi Songkok Recca," 51.

Versi ketiga, dari budayawan Andi Baso Bone Mappasisi, menyatakan bahwa songkok ini sudah dikenal sejak masa raja Bone pertama, Manurunge ri Matajang, jauh sebelum peristiwa 1683²². Versi keempat, dari budayawan muda Abdi Mahesa, berpendapat bahwa songkok ini adalah hasil adopsi dari budaya luar, meski dengan fungsi yang berbeda karena di Bone penutup kepala digunakan sebagai penanda stratifikasi sosial, bukan identitas religius²³.

Dibaca melalui kerangka *thick description* Geertz, keragaman versi ini sendiri adalah data yang bermakna. Ketiadaan rujukan lontara yang secara eksplisit menjelaskan asal-usul songkok menunjukkan bahwa benda ini, betapapun sentralnya dalam kehidupan sosial Bone, tidak pernah menjadi objek pencatatan resmi istana sebagaimana pusaka atau silsilah kerajaan²⁴. Songkok Recca hidup terutama dalam ingatan kolektif dan praktik sehari-hari, bukan dalam teks tertulis. Klaim etimologis yang mengaitkan songkok dengan golongan *to acca* turut dikuatkan oleh dokumentasi visual sezaman: potret Malla Arung Manajeng, seorang *litterator* atau sastrawan Bugis dari Bone, yang difoto studio Gaya Baru di Ujungpandang sekitar 1935 dengan mengenakan songkok khas Bugis-Bone²⁵. Foto keluarganya yang lain bahkan mencatat di bagian belakangnya, dalam aksara lontara, dua judul karya tulisnya, *La Temmu Pageq Arung Labuaja* dan *Toloq Rumpaqa Bone*²⁶, sebuah bukti visual-tekstual langka yang menghubungkan langsung antara sosok *to acca* (cendekiawan), penggunaan songkok, dan tradisi tulis-menulis lontara Bone.

Perlu ditegaskan bahwa keempat narasi di atas hanya membicarakan asal-usul objeknya, bukan sejarah panjang Kerajaan Bone secara umum. Sejalan dengan batas periodisasi yang dijelaskan pada Pendahuluan, artikel ini tidak menelusuri garis waktu dinasti Bone sejak awal berdirinya, dan langsung memusatkan perhatian pada titik ketika aturan pemakaian Songkok Recca mulai dibakukan secara rinci, yaitu pada masa pemerintahan La Mappanyukki, yang baru dapat dipahami setelah menelusuri secara singkat pergolakan politik Bone pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

²²Andi Baso Bone Mappasisi, wawancara, dikutip dalam Ilham dan Yosafat Tamara Durry, "Persepsi Masyarakat Terhadap Songkok To Bone Sebagai Pakaian Adat Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Bugis Bone," Jurnal SILABI Education VIII, no. 3 (2020): 169, sebagaimana dikutip ulang dalam Ariandi dan Jufri, "Eksistensi Songkok Recca," 52.

²³Abdi Mahesa, Budayawan Muda Sulawesi Selatan, wawancara pada 1 Februari 2021, dikutip dalam Ariandi dan Jufri, "Eksistensi Songkok Recca," 52-53.

²⁴Ariandi dan Jufri, "Eksistensi Songkok Recca," 53.

²⁵"Malla Arung Manajeng, Boeginees litterator uit Bone," Koleksi Digital KITLV, Leiden, shelfmark KITLV 31933, <http://hdl.handle.net/1887.1/item:802847>.

²⁶"Malla Arung Manajeng, Boeginees literator uit Bone, met echtgenote en kinderen," Koleksi Digital KITLV, Leiden, shelfmark KITLV 26133, <http://hdl.handle.net/1887.1/item:782464>.

Pada akhir abad ke-19, Kerajaan Bone berada di bawah pemerintahan La Pawawoi Karaeng Sigeri, raja ke-31, yang menjabat sejak 1895²⁷. Hubungannya dengan Belanda pada masa-masa awal sejatinya kooperatif, namun berbalik drastis ketika La Pawawoi menolak permintaan Belanda untuk menguasai pelabuhan utama Kerajaan Bone di Pallime, dengan alasan bahwa keputusan semacam itu bukan kewenangan raja semata, melainkan harus melalui musyawarah Dewan *Ade' Pitu* Kerajaan Bone²⁸. Penolakan inilah yang berujung pada ekspedisi militer Belanda ke Sulawesi Selatan pada 1905²⁹, yang oleh seorang saksi mata Belanda turut didokumentasikan secara langsung dalam catatan harian yang diterbitkan tak lama setelah peristiwanya³⁰, dan turut tercatat dalam laporan administratif kolonial seperti *Memori van Overgave* pejabat Gubernemen Celebes pada dekade-dekade berikutnya³¹. Setelah perlawanan gerilya selama beberapa bulan, La Pawawoi ditangkap pada Desember 1905 dan diasingkan ke Bandung, lalu Batavia, hingga wafat pada 1911³². Sejak ekspedisi 1905 itu, Bone tidak lagi memiliki seorang Arumpone yang dilantik resmi selama 26 tahun; pemerintahan dijalankan oleh Dewan Hadat atau *Arung Pitu*, hingga akhirnya pada Kamis, 2 April 1931, Andi Mappanyukki dilantik sebagai Arumpone Bone yang baru di bawah sistem *zelfbestuur* atau pemerintahan tak langsung Belanda³³. Sejak titik pelantikan inilah, sebagaimana akan diuraikan pada bagian berikut, aturan pemakaian Songkok Recca dibakukan secara jauh lebih rinci, dan pada titik itu pula fokus utama artikel ini dimulai.

Standardisasi Hierarki pada Masa La Mappanyukki

Terlepas dari perdebatan asal-usulnya, seluruh sumber yang dikaji sepakat bahwa pada masa Kerajaan Bone, penggunaan Songkok Recca diatur secara rinci berdasarkan strata sosial pemakainya, dan pengaturan paling rinci

²⁷"Riwayat Raja Bone (31): La Pawawoi Karaeng Segeri," Palontaraq.id, 21 Juni 2018.

²⁸"Rumpa'na Bone: Perang Bone 1905," Ragam Telusur, Koleksilokal.com.

²⁹"Perang Bone: Latar Belakang dan Kronologi," Kompas.com, 29 Juni 2021.

³⁰Anonim, "Gebeurtenissen bij het begin der Boni-expeditie door een ooggetuige; Uit mijn dagboek," dalam Boon's Geillustreerd Magazijn 7 (1905), sebagaimana dirujuk dalam Anwar Thosibo, "Gerakan Petta Barang di Daerah Bugis pada 1906-1913," (2017).

³¹A. J. Baron Quarles de Quarles, *Memori van Overgave Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden* (Mei 1908-Agustus 1910), Koleksi Arsip Edward L. Poelinggomang, sebagaimana dirujuk dalam Thosibo, "Gerakan Petta Barang."

³²"Buku: La Pawawoi Karaeng Segeri, Raja Bone XXXI," Bengkel Narasi, 26 Januari 2022.

³³"Uit onze Overzeesche Gewesten in Azië — De installatie van den Aroempone: Een belangrijk feit in de geschiedenis van Bone," *De Hollandsche Revue* 36, no. 1 (1931): 449.

terjadi pada masa pemerintahan La Mappanyukki. Tabel berikut merangkum ketentuan proporsi lilitan benang emas untuk setiap golongan³⁴:

Tabel 1. Ketentuan proporsi lilitan benang emas untuk setiap golongan.

Golongan / Strata	Proporsi Lilitan Emas	Keterangan
Anak Pattola (putra mahkota)	Penuh	Hanya dikenakan anak raja berstatus putra mahkota
Arung Mattola Menre / kerabat dekat raja	$\pm 3/5$ tinggi songkok	Kerabat dekat raja di luar putra mahkota
Raja Matase	$\pm 1/2$ tinggi songkok	Golongan bangsawan tingkat menengah
Tau Deceng, Tau Maradeka, Tau Sama	$\pm 1/4$ (tipis)	Masyarakat merdeka / kebanyakan
Ata (hamba)	Tidak ada	Songkok polos, tidak berhias emas sama sekali

Gambar 2. Ilustrasi skematis proporsi lilitan benang emas Songkok Recca menurut strata sosial.



(Ilustrasi diagram oleh penulis, disusun berdasarkan data pada Ariandi dan Jufri, "Eksistensi Songkok Recca," 57-58, dan Siri dkk., "Preserving Songkok Reccak in Modern Era," 893; bukan reproduksi foto arsip.)

Deskripsi pengamat asing turut menguatkan gambaran ini. Brooke, sebagaimana dikutip Pelras, mencatat bahwa pada 1840 ketika raja Bone memasuki wilayah kekuasaannya, para bangsawan tingkat rendah memiringkan songkok mereka ke belakang kepala, sementara saudara-saudara raja memiringkannya ke kiri dan bangsawan lain ke kanan, dengan derajat kemiringan yang disesuaikan dengan pangkat masing-masing³⁵. Tingkat kerincian aturan ini, sampai pada proporsi lebar lilitan emas sepersekian dari tinggi songkok untuk setiap golongan, menegaskan bahwa Songkok Recca bukan perhiasan yang dipakai sesuka hati, melainkan instrumen kontrol sosial yang diatur secara hampir birokratis oleh istana. Dalam bahasa Geertz, sistem

³⁴Ariandi dan Jufri, "Eksistensi Songkok Recca," 57-58; Siri dkk., "Preserving Songkok Reccak in Modern Era," 893.

³⁵Brooke, dikutip dalam Pelras, *The Bugis*, sebagaimana dirujuk ulang dalam Siri dkk., "Preserving Songkok Reccak in Modern Era," 893.

penandaan semacam ini menuntut kesepakatan kolektif yang sangat kuat mengenai makna setiap detail visual³⁶.

Kepatuhan masyarakat Bone terhadap aturan seketat ini tidak dapat dipahami tanpa merujuk pada nilai *siri'* atau rasa malu dan kehormatan, yang oleh Rahman Rahim digambarkan sebagai salah satu nilai utama yang menggerakkan seluruh tata perilaku orang Bugis, termasuk dalam hal kepatutan atau *asittinajang*, yaitu menempatkan sesuatu sesuai derajatnya³⁷. Mattulada, dalam *Latoa*, menjelaskan bahwa struktur politik-adat masyarakat Bugis-Bone dibangun di atas keseimbangan ketat antara hak dan kewajiban setiap strata, sehingga setiap simbol material, termasuk penutup kepala, harus selaras dengan posisi seseorang dalam tatanan tersebut³⁸. Kerangka nilai inilah yang menjelaskan mengapa pelanggaran terhadap aturan pemakaian Songkok Recca pada masa kerajaan bukan perkara sepele, melainkan pelanggaran terhadap kehormatan diri dan keluarga.

Di samping fungsi sebagai penanda strata bangsawan, sumber-sumber yang dikaji juga mencatat adanya varian *Songko Guru* yang telah disinggung pada Pendahuluan, yakni songkok yang dikenakan para guru mengaji dan pejabat urusan keagamaan, dengan bentuk sedikit berbeda dan tanpa hiasan emas³⁹. Keberadaan varian ini menunjukkan bahwa makna Songkok Recca pada masa kerajaan sudah plural sejak awal: ia adalah penanda strata bangsawan sekaligus penanda golongan religius-intelektual secara bersamaan, bukan simbol bermakna tunggal, dan koeksistensi kedua fungsi inilah yang menjadi temuan penting kedua penelitian ini.

Sebagai catatan metodologis, pertanyaan apakah bentuk Songko Guru berakar dari tradisi sorban (*imamah*) Arab atau Persia, sebagaimana lazim dibahas dalam kajian akulturasi busana kepala Islam di Nusantara secara umum^{40,41}, belum terjawab tuntas oleh sumber-sumber primer yang tersedia untuk Bone secara spesifik. Hubungan ini masih berstatus sebagai kemungkinan komparatif yang dibangun dari pola umum akulturasi busana kepala Islam di Nusantara, bukan temuan yang dapat dipastikan dari arsip lokal Bone, sehingga ditandai di sini secara eksplisit sebagai keterbatasan, bukan disamakan sebagai kesimpulan yang sudah pasti.

³⁶Geertz, *The Interpretation of Cultures*.

³⁷Rahman Rahim, *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 66, 126, 129.

³⁸Mattulada, *Latoa: Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* (1975), 44, 65-68, 150-153.

³⁹Ariandi dan Jufri, "Eksistensi Songkok Recca," 56.

⁴⁰Rozan Yunos, "The Origin of the Songkok or Kopiah," *The Brunei Times*, 23 September 2007.

⁴¹"Teori Masuknya Islam di Nusantara dan Perkembangan Pendidikan Islam," *Jurnal Paradigma* 14, no. 1 (2025).

Songkok Recca dan Legitimasi Kolonial Belanda

Catatan geografis Belanda seperti *Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap* telah menyebut istilah “bonesche adel” atau bangsawan Bone sejak 1898, tujuh tahun sebelum ekspedisi militer 1905⁴², sebuah indikasi bahwa struktur kebangsawanan Bone sudah menjadi subjek pengamatan kolonial sejak sebelum periode konflik. Pola hubungan antara Bone dan pemerintah kolonial Belanda, sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, berubah drastis dari kooperatif menjadi represif begitu otoritas lokal dianggap mengancam kepentingan ekonomi dan politik kolonial. Sikap kolonial Belanda terhadap struktur kebangsawanan Bone, dengan demikian, bersifat kondisional: didukung sepanjang kooperatif, namun ditumpas dengan kekuatan militer begitu menolak tunduk, sebagaimana terjadi pada La Pawawoi.

Gambar 3. Penangkapan Raja Bone La Pawawoi Karaeng Sigeri, 1905.



(Sumber: Koleksi Museum La Pawawoi, Watampone)

Dokumentasi foto penangkapan dan pengasingan La Pawawoi tersebut, yang hingga kini tersimpan di Museum La Pawawoi, Watampone⁴³, menjadi penanda visual paling tegas dari sisi represif kebijakan kolonial: berbeda dengan foto-foto instalasi penguasa Bone yang dipublikasikan secara terbuka di media kolonial, foto penangkapan ini adalah dokumentasi atas kekalahan, bukan perayaan kekuasaan. Yang menarik untuk dicermati adalah apa yang terjadi setelah penaklukan tersebut. Daripada menghapus total struktur kebangsawanan Bone, Belanda justru memulihkannya dalam bentuk baru melalui sistem *zelfbestuur* sejak 1931, yakni pemerintahan tak langsung yang mempertahankan figur dan simbol kebangsawanan lokal di bawah supervisi kolonial.

⁴²Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap (1898): 535.

⁴³"Sejarah Bone," Rssing.com, koleksi Museum La Pawawoi.

Gambar 4. Prosesi instalasi penguasa Bone, koleksi KITLV.



(Sumber: Digital Collections Universiteit Leiden, shelfmark KITLV 4991 & 4993)

Koleksi foto KITLV berjudul “Installatie van de vorst van Bone” memperlihatkan iring-iringan prosesi adat dengan payung kebesaran besar yang dipayungkan di atas para bangsawan, dikelilingi pengikut dan pengawal berpakaian tradisional bersongkok serta beberapa berseragam Eropa⁴⁴. Di sinilah kritik sumber perlu diterapkan secara cermat: lembaga arsip menanggalkan kedua foto ini “sekitar 1910”, padahal *De Hollandsche Revue* secara eksplisit menyatakan bahwa Bone tidak memiliki Arumpone yang dilantik resmi selama 26 tahun pascaekspedisi 1905, hingga pelantikan Andi Mappanyukki pada 1931. Ketegangan tanggal ini tidak serta-merta membatalkan nilai kedua foto sebagai dokumentasi prosesi kebangsawanan Bone, namun menunjukkan bahwa penanggalan koleksi arsip kolonial perlu diperlakukan sebagai perkiraan, bukan kepastian, dan idealnya diverifikasi lebih lanjut terhadap kemungkinan bahwa foto tersebut mendokumentasikan instalasi pejabat adat lain selain Arumpone, ataukah penanggalan arsipnya yang keliru.

Terlepas dari ketegangan tanggal tersebut, artikel “Installatie van den Aroempone” dalam *De Hollandsche Revue* tahun 1931 menjadi bukti tekstual yang lebih pasti⁴⁵, dan foto kelompok yang diambil setahun setelahnya, menampilkan Arumpone Bone bersama sejumlah pejabat kolonial Belanda,

⁴⁴“Installatie van de vorst van Bone,” Koleksi Digital KITLV, Leiden, shelfmark KITLV 4993, <http://hdl.handle.net/1887.1/item:789271>; shelfmark KITLV 4991, <http://hdl.handle.net/1887.1/item:765932>.

⁴⁵“Uit onze Overzeesche Gewesten in Azië — De installatie van den Aroempone,” *De Hollandsche Revue* 36, no. 1 (1931): 449.

termasuk asisten residen J.W.T. Heringa, di Sinjai pada 1932⁴⁶, menjadi indikasi paling konkret bahwa pemerintah kolonial tidak menyembunyikan ataupun melarang kembalinya figur kebangsawanan Bone, melainkan secara aktif terlibat dan tampil bersamanya di depan publik. Dibaca melalui kerangka kontrol sosial yang dibahas sebelumnya, pola ini mengarah pada satu kemungkinan tafsir: bahwa keterlibatan dan pendokumentasian tersebut sejalan dengan kepentingan kolonial untuk melegitimasi sistem *zelfbestuur* yang mereka pertahankan, dengan membiarkan, bahkan menonjolkan, simbol hierarki lokal seperti Songkok Recca sebagai bagian dari pertunjukan otoritas yang sah di mata rakyat Bone sendiri.

Perlu digarisbawahi bahwa tafsir ini bersifat inferensial, bukan kesimpulan yang berdiri di atas bukti tekstual langsung mengenai kebijakan resmi Belanda terhadap Songkok Recca secara spesifik. Laporan administratif kolonial sejenis *Memori van Overgave* yang disusun para pejabat Gubernur Celebes kemungkinan menyimpan informasi yang lebih rinci mengenai kebijakan resmi Belanda terhadap simbol-simbol kebangsawanan lokal, namun penelitian ini belum berhasil mengaksesnya secara utuh, sehingga argumen mengenai motif kolonial pada bagian ini perlu dibaca sebagai pembacaan pola yang masuk akal berdasarkan bukti fotografis dan tekstual yang tersedia, bukan sebagai kepastian arsip administratif yang belum ditemukan.

Transisi Pasca-1950: Hilangnya Daya Ikat Hierarki

Keruntuhan sistem kerajaan yang dibahas pada bagian ini tidak dapat dilepaskan dari konteks nasional Revolusi Kemerdekaan Indonesia (1945-1949) dan konsolidasi politik yang menyusulnya. Bone, sebagai bagian dari Negara Indonesia Timur yang dibentuk Belanda pasca-Perang Dunia II, mengalami gejolak politik internal yang sejalan dengan semangat anti-federalisme yang melanda banyak wilayah Indonesia pada masa pasca-kemerdekaan, sebelum akhirnya bergabung penuh dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 1950.

Naskah etnografis Baso dan Hasan mencatat bahwa pada paro kedua abad ke-20, Songkok Recca telah memiliki tiga fungsi sosial: sebagai pakaian sehari-hari yang mulai terdesak budaya luar, sebagai pakaian upacara dalam perkawinan dan upacara *Maccera Babua*, serta sebagai sumber mata pencaharian khususnya di Desa Pacing dan Pappolo, Kecamatan Awangpone⁴⁷. Tiga fungsi ini, jika dibandingkan dengan fungsi tunggal songkok pada era La Mappanyukki yang semata-mata sebagai penanda kebangsawanan,

⁴⁶"O.a. het echtpaar Pronk, Van Hattum, assistent-resident J.W.T. Heringa, Aroempone (vorst) van Bone in Sindjai," Koleksi Digital KITLV, Leiden, shelfmark KITLV 119969, <http://hdl.handle.net/1887.1/item:889801>.

⁴⁷Baso dan Hasan, Songko Ure Cak.

menunjukkan pergeseran yang sudah mulai terjadi menjelang berakhirnya sistem kerajaan.

Pergeseran ini berpuncak pada peristiwa politik yang menjadi batas akhir kajian ini. Pada Mei 1950, terjadi demonstrasi rakyat di Watampone yang menuntut dibubarkannya Negara Indonesia Timur serta dihapuskannya pemerintahan kerajaan, yang kemudian disusul pengunduran diri anggota Hadat Tujuh dan bergabungnya Bone secara sukarela ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴⁸. Begitu kekuasaan yang menopang sistem strata sosial Bone dibubarkan, aturan mengenai siapa yang berhak mengenakan songkok berpinggir emas tinggi pun ikut kehilangan daya paksanya⁴⁹. Sejak titik itu, dan berlanjut hingga hari ini, aturan berjenjang berdasarkan gelar kebangsawanan sebagaimana diuraikan pada Tabel 1 tidak lagi berlaku secara formal; Songkok Recca berangsur bergeser dari instrumen hierarki menjadi produk budaya dan komoditas ekonomi warga Desa Pacing, sebuah proses yang berpuncak pada pengakuannya sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia pada 2018. Dibaca melalui kerangka Geertz, peristiwa 1950 ini adalah titik ketika otoritas tunggal yang menjaga makna Songkok Recca, yakni istana, kehilangan kekuatan untuk membatasinya, sebuah keruntuhan yang menjadi batas penutup yang tepat bagi kajian historis ini, sekaligus pembuka bagi babak baru yang melampaui lingkup penelitian ini.

Jika dirangkai, kajian ini menunjukkan bahwa makna Songkok Recca sudah berlapis sejak sebelum keruntuhan Kerajaan Bone, bukan baru menjadi beragam pada masa modern. Setidaknya tiga lapisan makna itu hadir dalam satu periode yang sama: keragaman narasi asal-usul yang tidak pernah tunggal; fungsinya sebagai penanda kedudukan bangsawan yang diatur sangat ketat melalui proporsi lilitan emas; dan fungsinya sebagai lambang golongan terpelajar agama melalui Songko Guru. Ketiga lapisan ini tidak saling meniadakan, melainkan berjalan bersamaan di dalam satu tatanan sosial yang sama, hingga tatanan itu kehilangan otoritas penopangnya pada 1950.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pada masa Kerajaan Bone, khususnya sejak dibakukan pada masa pemerintahan La Mappanyukki, Songkok Recca berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang hampir birokratis, dengan ketentuan lilitan emas yang rinci sesuai strata bangsawan, dan bahwa kepatuhan terhadap aturan ini ditopang oleh nilai *siri* serta struktur politik-adat Latoa. Penelitian ini juga menemukan bahwa makna Songkok Recca telah

⁴⁸Usman Nukma, *Bone Pesona Dunia* (Bone: Pelita Pustaka kerjasama Disbudpar Kabupaten Bone, 2013), 4, dikutip dalam Ariandi dan Jufri, "Eksistensi Songkok Recca," 53.

⁴⁹Siri dkk., "Preserving Songkok Reccak in Modern Era," 893-894.

plural sejak sebelum periode modern, melalui koeksistensi fungsi sebagai penanda bangsawan dan penanda golongan religius-intelektual lewat Songko Guru. Temuan dari arsip kolonial menunjukkan bahwa pejabat kolonial Belanda hadir dan mendokumentasikan prosesi pelantikan Arumpone pada 1931 lengkap dengan seluruh atribut kebangsawanan, termasuk Songkok Recca, sebuah pola yang secara inferensial dapat dibaca sebagai bagian dari strategi legitimasi sistem *zelfbestuur*.

Adapun nasib Songkok Recca setelah bubarnya kerajaan, termasuk pergeserannya menjadi sumber penghidupan di Desa Pacing, pengakuannya sebagai Warisan Budaya Tak Benda pada 2018, dan kaitannya dengan perkembangan nilai-nilai keislaman masa kini, layak dikaji lebih jauh melalui pendekatan antropologi atau sosiologi budaya, sebagai kelanjutan dari batas historis yang ditetapkan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariandi, Muh. Farid, dan Muhammad Jufri. "Eksistensi Songkok Recca dalam Peradaban Masyarakat Bone." CARITA: Jurnal Sejarah dan Budaya (2022): 45-64.
- Arifin, Faizal. Metode Sejarah: Merencanakan dan Menulis Penelitian Sejarah. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Baso, Jawiah A., dan Salahuddin Hasan. Songko Ure Cak (Topi Tradisional Bugis Makassar). Ujung Pandang: Proyek Pengembangan Permuseuman Sulawesi Selatan, 1983-1984.
- "Buku: La Pawawoi Karaeng Segeri, Raja Bone XXXI." Bengkel Narasi, 26 Januari 2022.
- Geertz, Clifford. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1973.
- Ilham, dan Yosafat Tamara Durry. "Persepsi Masyarakat Terhadap Songkok To Bone Sebagai Pakaian Adat Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Bugis Bone." Jurnal SILABI Education VIII, no. 3 (Januari-Maret 2020).
- "Installatie van de vorst van Bone." Koleksi Digital KITLV, Leiden, shelfmark KITLV 4991, <http://hdl.handle.net/1887.1/item:765932>; shelfmark KITLV 4993, <http://hdl.handle.net/1887.1/item:789271>. Sekitar 1910.
- "Uit onze Overzeesche Gewesten in Azië — De installatie van den Aroempone: Een belangrijk feit in de geschiedenis van Bone." De Hollandsche Revue 36, no. 1 (1931): 449.
- "O.a. het echtpaar Pronk, Van Hattum, assistent-resident J.W.T. Heringa, Aroempone (vorst) van Bone in Sindjai." Koleksi Digital KITLV, Leiden, shelfmark KITLV 119969, <http://hdl.handle.net/1887.1/item:889801>. 1932.
- "Malla Arung Manajeng, Boeginees litterator uit Bone." Koleksi Digital KITLV, Leiden, shelfmark KITLV 31933, <http://hdl.handle.net/1887.1/item:802847>. Sekitar 1935.
- "Malla Arung Manajeng, Boeginees literator uit Bone, met echtgenote en kinderen." Koleksi Digital KITLV, Leiden, shelfmark KITLV 26133, <http://hdl.handle.net/1887.1/item:782464>. Sekitar 1935.

- Madjid, M. Saleh, dan Ahmad Wahyudi. Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Mattulada. Latoa: Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis. 1975.
- Nukma, Usman. Bone Pesona Dunia. Bone: Pelita Pustaka kerjasama Disbudpar Kabupaten Bone, 2013.
- Nurlaeliana, Satriani, Tauhidah Bachtiar, Anita H, Mutmainna Ekawati, Fandi Wahyudi, dan Hasmatang. "Kajian Etnobotani *Borassus flabellifer* Bahan Baku Songkok Recca Ciri Khas Masyarakat Bugis Bone." *Biogenerasi: Jurnal Pendidikan Biologi* 10, no. 2 (2025): 1734-1740.
- Pelras, Christian. *The Bugis*. Oxford: Blackwell Publishers, 1996.
- "Perang Bone: Latar Belakang dan Kronologi." *Kompas.com*, 29 Juni 2021.
- Quarles de Quarles, A. J. Baron. *Memori van Overgave Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden (Mei 1908-Agustus 1910)*. Koleksi Arsip Edward L. Poelinggomang.
- Rahim, Rahman. *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- "Riwayat Raja Bone (31): La Pawawoi Karaeng Segeri." *Palontaraq.id*, 21 Juni 2018.
- "Rumpa'na Bone: Perang Bone 1905." *Ragam Telusur*, *Koleksilokal.com*.
- Salinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. *Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia*. 2018.
- "Sejarah Bone." *Rssing.com*, koleksi Museum La Pawawoi.
- Siri, Hasnani, Muhammad Farid, Muhammad Jufri, Muhiddin Bakri, dan Nurlili Ramli. "Preserving Songkok Reccak in Modern Era: Identity of Bugis People in Bone Regency." *Russian Law Journal* XI, no. 3 (2023): 890-896.
- "Teori Masuknya Islam di Nusantara dan Perkembangan Pendidikan Islam." *Jurnal Paradigma* 14, no. 1 (2025).
- Thosibo, Anwar. "Gerakan Petta Barang di Daerah Bugis pada 1906-1913." (2017).
- Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap*. 1898: 535.
- Wekke, Ismail Suardi, Rosdalina Bukido, dan Nam Rumkel. *Islam dan Adat, Keteguhan Adat dalam Kepatuhan Beragama*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Yunos, Rozan. "The Origin of the Songkok or Kopiah." *The Brunei Times*, 23 September 2007.